
PENDIDIKAN DAN PERGERAKAN NASIONAL: BANYUWANGI AWAL ABAD XX

EDUCATION AND NATIONAL MOVEMENT: BANYUWANGI IN THE EARLY 20th CENTURY

Bahagio Raharjo

Universitas Gadjah Mada

Bulaksumur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

bahagiorahardjo@gmail.com

Diterima tanggal 8 Juni 2021

Disetujui tanggal 2 Juni 2022

ABSTRACT

Modern education in Banyuwangi, which was established by the government, firstly appeared in 1819 in the form of the Europeesche Lagere School (ELS), approximately two years after the first school has founded in the Dutch East Indies. The existence of this school is inseparable from the interests and needs of the government to prepare skilled government employees. The existing schools were not well developed even though the need for modern schools increased. The enactment of the ethical policy provided an opportunity for non-government parties. Subsequently, schools established by Indo-European, Arab, and Chinese entrepreneurs, and national movement organization. This paper studies the dynamics of their roles in founding a modern school in Banyuwangi during the era of ethical policy. This study used historical methods to explain the education and policies that encouraged the non-government sector's efforts at that time in actively establishing schools for their respective groups. The study found that ethical policy opened opportunities and strengthened the existence of parties outside the government to establish schools in Banyuwangi and develop modern education. The changes were in the strengthening of plantation companies that promoted the opening of new areas, the economic crisis, and the politics of segregation demanded the availability of schools for all groups.

Keywords: *Dutch colonial, modern schools, national movement organizations, and private sector.*

ABSTRAK

Pendidikan modern di Banyuwangi yang didirikan pemerintah pertama kali hadir pada 1819 dalam bentuk *Europeesche Lagere School (ELS)*, kurang lebih dua tahun sejak sekolah pertama didirikan di Hindia-Belanda. Keberadaan sekolah ini tidak terlepas dari kepentingan dan kebutuhan pemerintah untuk mempersiapkan pegawai-pegawai pemerintah yang terampil. Meskipun kebutuhan akan sekolah modern

semakin meningkat, sekolah-sekolah yang ada tidak berkembang dengan baik. Pemberlakuan kebijakan Politik Etis membuka kesempatan bagi pihak non-pemerintah. Maka berdirilah sekolah-sekolah oleh pengusaha Indo-Eropa, Arab, Tionghoa, serta organisasi pergerakan nasional. Tulisan ini melihat dinamika peran kelompok-kelompok dalam menjawab kebutuhan akan sekolah modern di Banyuwangi masa Kebijakan Politik Etis. Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk menjelaskan keadaan dan kebijakan pendidikan saat itu yang mendorong upaya dari sektor non pemerintah untuk secara aktif mendirikan sekolah untuk kebutuhan kelompoknya masing-masing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Politik Etis membuka kesempatan dan menguatkan keberadaan pihak-pihak di luar pemerintah untuk mendirikan sekolah di Banyuwangi dan mengembangkan pendidikan modern. Perubahan yang terjadi seperti menguatnya perusahaan perkebunan sehingga mendorong pembukaan wilayah baru, krisis ekonomi, dan politik segregasi menuntut adanya sekolah untuk semua kelompok.

Kata kunci: kolonial Belanda, sekolah modern, organisasi pergerakan nasional, dan peranan swasta.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan pertama kali hadir di Banyuwangi pada 1819, kurang lebih 2 tahun setelah pendirian sekolah pertama untuk anak-anak Eropa, Europeesche Lagere School (ELS). Sekolah ini tidak mengalami perkembangan yang baik sehingga pada 1837 sekolah ini dilaporkan ditutup setelah sebelumnya dikelola swasta kurang lebih 2 tahun. Pada 1853, sekolah dengan jenis yang sama didirikan kembali di Banyuwangi. Pendirian sekolah ini bertujuan menjawab kebutuhan anak-anak Eropa dan Indo-Eropa yang tidak mendapatkan pendidikan sama sekali di wilayah tersebut. Sekolah dibuka pertama kali pada 16 Mei 1853 dan pada tahun yang sama berhasil menyelenggarakan ujian publik pertama kali. Sekolah ini menjadi satu-satunya sekolah pemerintah untuk anak-anak Eropa yang terus mengalami perkembangan sampai setelah berlakunya kebijakan Politik

Etis (*Algemeen verslag van den staat van het schoolwezen in Nederlandsch-Indie* 1854:40-41). Tercatat beberapa anak dari elite lokal bumiputra dan Tionghoa mengenyam pendidikan di sekolah ini. Keberadaan anak-anak elite lokal ini menjadi cikal bakal sejarah pendidikan modern bagi anak-anak bumiputra di Banyuwangi.

Keberadaan sekolah modern di Banyuwangi tidak terlepas dari upaya politik pemerintah yang melihat posisi Banyuwangi sebagai posisi strategis yang berbatasan dengan Bali. Bali yang saat itu belum berada di bawah kekuasaan kolonial memiliki pengaruh yang sangat kuat di Banyuwangi. Oleh karenanya, penguatan posisi politik pemerintah kolonial di Banyuwangi menjadi penting untuk membendung pengaruh Bali di Jawa. Keberadaan pendidikan modern adalah bagian besar dari kebijakan politik pemerintah yang berupaya menguatkan posisinya di Banyuwangi dengan membentuk

elite politik dan pegawai pemerintah yang sesuai kebutuhan pemerintah kolonial. Kebijakan ini diperkuat dengan aturan yang mewajibkan pegawai pemerintah dari kalangan bumiputra, baik itu dari yang terbawah sampai bupati, untuk menempuh pendidikan modern yang ada. Kewajiban inilah yang secara tidak langsung mendorong keluarga elite Banyuwangi menyekolahkan anak-anaknya di sekolah modern pemerintah. Keberadaan keluarga elite di sekolah modern pada dasarnya adalah langkah pemerintah kolonial untuk mendorong upaya pendidikan secara lebih luas dengan menggunakan elite-elite lokal yang memiliki peran sosial dan politik yang besar di masyarakat.

Alasan kedua adalah adanya perusahaan perkebunan swasta yang membutuhkan pegawai-pegawai terampil dan berpendidikan. Pekerjaan baru ini membutuhkan keterampilan baca tulis dan menghitung yang cukup, yang hanya dapat dipelajari di sekolah modern. Adanya peluang pekerjaan di sektor swasta dan peluang bekerja di pemerintahan mendorong masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi mapan, untuk menyekolahkan anaknya di sekolah modern. Hal inilah yang membuat permintaan akan sekolah modern menjadi sangat tinggi.

Sebelum pendidikan modern yang dibawa pemerintah kolonial menguat, pendidikan bumiputra hanya terbatas pada pendidikan tradisional seperti pesantren atau pembelajaran Al-Qur'an di langgar (musala). Pendidikan ini berkembang dan tersebar di hampir seluruh desa di Banyuwangi. Kuatnya nilai keislaman, akses kepada pekerjaan

modern yang tidak cukup, dan juga kesempatan bersekolah di sekolah modern yang sangat kecil mendorong orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tradisional. Hal ini sempat menimbulkan kekhawatiran pemerintah kolonial. Kekhawatiran ini muncul atas dugaan bahwa orang tua murid akan memindahkan anaknya dari sekolah pemerintah ke sekolah tradisional karena kuatnya tradisi pendidikan tradisional dengan nilai keislaman. Pemerintah pada dasarnya tidak pernah mencampuri sekolah tradisional ini. Pemerintah tidak melakukan pelarangan akan tetapi juga tidak memberikan dukungan. Sekolah ini berkembang dengan sendirinya di setiap desa. Oleh karena itu, ketika sekolah modern semakin berkembang, sekolah ini juga masih tetap bertahan.

Sekolah pemerintah pertama untuk bumiputra dibuka pada 5 Maret 1860 (*Algemeen verslag van den staat van het schoolwezen in Nederlandsch-Indie* 1854:188).¹ Guru pertama di sekolah ini adalah Soemo Dirdjo, anak dari patih Banyuwangi, yang merupakan lulusan sekolah guru. Pada tahun pertama pembukaan sekolah, tercatat terdapat 24 siswa yang terbagi ke dalam 4 kelas. Antusiasme tinggi yang terlihat dari jumlah siswa diduga karena orang tua lebih percaya pada sekolah dengan pengajar yang berasal dari keluarga elite bumiputra yang memiliki budaya yang sama. Mata pelajaran yang

¹ Sebelum pendirian sekolah ini, pemerintah telah mengirimkan anak-anak elite lokal untuk bersekolah di sekolah guru di Solo, seperti halnya Bagus Darjono, seorang anak dari kepala jaksa di Banyuwangi.

diajarkan di sekolah ini antara lain menulis dan membaca aksara Jawa dan Latin, hitungan sederhana, hubungan lanjut dalam aritmatika dan geografi terutama mengenai Jawa dan wilayah-wilayah lain di Hindia Belanda.

Pendirian sekolah ini rupanya menjadi akhir dari upaya pendirian sekolah dasar oleh pemerintah. Hingga dimulainya kebijakan Politik Etis pun sekolah dasar yang ada tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan yang ada berupa pendirian sekolah-sekolah kelas dua dan juga sekolah desa. Sekolah dasar yang terintegrasi dengan sistem pendidikan pemerintah hanya terbatas pada sebuah ELS dan sebuah sekolah bumiputra yang pada 1920 menjadi *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS). Lambatnya upaya pemerintah ini mendorong beberapa organisasi mendirikan sekolah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Alasan utama dari keterlibatan organisasi baik bumiputra, Indo-Eropa, Arab, ataupun Tionghoa adalah mendorong keterlibatan kelompok etniknya pada kesempatan pekerjaan, sosial, dan politik yang ada. Seperti halnya pendirian sekolah oleh Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) yang merupakan bagian dari program organisasi untuk ikut membangun kualitas hidup orang-orang bumiputra.

Peranan mereka ini mendapatkan momentumnya pada 1920an dan puncaknya pada 1930an. Pada 1920 merupakan masa terbaik dari perkembangan organisasi dan kesadaran pergerakan nasional, sedangkan 1930an awal merupakan masa krisis ekonomi yang membuat pemerintah enggan untuk melanjutkan program pendirian

sekolah dan menutup beberapa sekolah kelas dua. Pada tahun tersebut, organisasi-organisasi pergerakan mulai menyebar di berbagai tempat di Jawa termasuk Banyuwangi dan sekaligus menjadi ciri khas dari perkembangan pendidikan di Banyuwangi. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana pihak swasta baik perusahaan dan pengusaha serta organisasi pergerakan berperan aktif dalam mendirikan sekolah, terutama sekolah dasar pada masa kebijakan Politik Etis? Peran aktif ini berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik saat itu, baik dalam skala nasional maupun khusus di Banyuwangi.

Tujuan penulisan ini dapat terbagi ke dalam beberapa aspek, dalam sisi historiografi tulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam kajian ekspansi kolonial yang cenderung dilihat dalam perspektif politik ataupun ekonomi. Di sisi lain, tulisan ini diharapkan mampu mengisi sejarah Banyuwangi masa kolonial yang masih sangat sedikit sekaligus memberikan wawasan yang lebih kompleks berkenaan dengan sejarah pendidikan di Indonesia, terutama sejarah pendidikan di daerah-daerah yang dianggap tidak penting seperti Banyuwangi.

Tinjauan terhadap beberapa tulisan yang berkaitan dengan pendidikan masa kolonial dilakukan oleh penulis. Tesis Christian Lambert Maria Penders, *Colonial Education Policy and Practice in Indonesia: 1900-1942* mencoba melihat langkah pemerintah kolonial dalam menghadirkan pendidikan modern yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional dalam

kerangka pembentukan negara kolonial baik sebelum ataupun masa kebijakan Politik Etis. Pendidikan dalam tulisan ini digambarkan sebagai suatu kesatuan dari program pemerintah yang dalam kerangka lebih besar disebut sebagai bagian dari sistem pembentukan masyarakat koloni yang ideal. Tulisan ini cukup baik dalam memberikan kerangka konseptual yang tepat dalam rangka pengkajian sejarah pendidikan di Indonesia era kolonial.

Tulisan kedua adalah karya Willy Rothrock, *The Development of Dutch-Indonesian Primary Schooling: A Study in Colonial Education*. Pendidikan dilihat sebagai akar lahirnya modernisme di Indonesia. Tulisan ini menyebutkan bahwa pendidikan dihadirkan untuk mencetak tenaga-tenaga terampil yang siap untuk bekerja dalam kelompok.

Secara kewilayahan, kajian historis tentang Banyuwangi sangat terbatas. Tulisan Sri Margana berjudul *Ujung Timur Jawa, 1763-1813: Perebutan Hegemoni Blambangan* dianggap satu-satunya penelitian yang komprehensif tentang wilayah Banyuwangi secara politik sejak masa kehadiran kekuatan Barat. Buku ini memberikan gambaran mengenai bagaimana upaya Barat dalam sistem politik yang kemudian mengubah susunan masyarakat dan elite lokal yang ada di Banyuwangi. Bahasan tersebut memiliki korelasi dengan tulisan ini, mengingat pendidikan yang hadir di Banyuwangi pada awal abad ke-19 sejalan dengan upaya politik pemerintah dan kebutuhan pendidikan bagi elite lokal.

Konsep utama dalam tulisan ini adalah pendidikan. Pendidikan yang

dimaksud dalam tulisan ini adalah pendidikan modern yang terbatas pada sekolah-sekolah yang terintegrasi dengan sistem pendidikan kolonial saat itu. Pendidikan dilihat sebagai bagian dari agenda politik pemerintah, baik untuk mencukupi kebutuhan tenaga kerja maupun menciptakan masyarakat baru yang secara tidak langsung membantu mengkonsolidasikan, mendukung dan menopang pemerintahan kolonial. Adapun swasta yang dimaksud dalam tulisan ini terbatas pada upaya-upaya di luar pemerintah, seperti pengusaha-pengusaha Tionghoa ataupun pengusaha Indo-Eropa yang beberapa di antaranya tergabung dalam organisasi *Inlandsche Europese Vereeniging* (IEV). Sedangkan penyebutan pergerakan nasional berkaitan dengan organisasi-organisasi pergerakan yang tumbuh subur utamanya pada 1920an, seperti PBI, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Al Irsyad.

Adapun cakupan temporal dalam tulisan ini adalah awal abad XX. Penyebutan masa kebijakan Politik Etis dalam tulisan ini pada dasarnya mencakup periode ketika berbagai usaha pendidikan dilakukan oleh beberapa kelompok yang ada di Banyuwangi, seperti organisasi pergerakan nasional, organisasi Indo-Eropa, organisasi Tionghoa dan Arab, serta usaha mandiri dari masing-masing kelompok ini pada awal abad XX.² Fungsi ini yang membuat masa kebijakan Politik Etis dapat

² Pemilihan periode ini juga merujuk pada beberapa tulisan sejarah pendidikan seperti Penders (1968), Makmur (1993), Nasution (2008), Brugmans (1938), Frankema (2013), Furnivall (1943), Rothrock (1975), dan Soetjiatiningih (1981)

menggantikan konsep waktu “pergerakan nasional” yang cenderung lebih sempit dan mengabaikan usaha-usaha di luar organisasi pergerakan nasional.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang menekankan pada heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Buku, terbitan resmi, laporan pemerintah, dan surat kabar merupakan sumber yang ditemukan dalam proses pengumpulan sumber (heuristik). Laporan resmi yang digunakan adalah laporan pendidikan (*Algemeen Verslag van den Staat van het Schoolwezen in Nederlandsch-Indie*, *Algemeen verslag van het Onderwijs in Nederlandsh-Indie*, *Onderwijs Statistiek Schooljaar*, laporan umum (*Algemeen verslag der residentie Banjoewangi*, *Memorie van Overgave*), dan terbitan pemerintah (*Regeerings-almanak voor Nederlandsch-Indie*, *Rapport in zake de werkvolkwestie in Banjoewangi*). Sedangkan surat kabar yang digunakan adalah surat kabar sezaman, seperti *Bataviaasch Nieuwsblad*, *De Indische Courant*, *Soerabaijasch Handelsblad*, *Nieuwe Courant*, dan *Wasita*.

Keberadaan unsur-unsur sosial, politik, maupun ekonomi dalam sumber tersebut dilihat sebagai unsur yang melingkupi topik pendidikan, yang berguna untuk melihat perkembangan terhadap pendidikan modern dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

C. HASIL DAN BAHASAN

Upaya swasta pada dasarnya telah hadir jauh sebelum masa kebijakan Politik

Etis, ketika pada 1835 sekolah pemerintah yang berdiri pada 1819 mengalami perubahan status menjadi sekolah swasta. Keberadaan sekolah swasta ini juga tercatat dalam laporan umum Banyuwangi 1829-1832, yang menyebutkan bahwa terdapat sebuah sekolah swasta yang dikepalai seorang guru Eropa yang bernama J.F. Scholten dan dibantu seorang raden yang memiliki kemampuan cukup baik dalam membaca dan menulis Belanda, matematika serta geografi.³ Sekolah ini menjadi cikal bakal sekolah modern milik swasta untuk bumiputra di Banyuwangi. Upaya swasta juga hadir di masa-masa awal berlakunya UU Agraria yang ditandai dengan masuknya perusahaan-perusahaan swasta di Banyuwangi. Pada 1881 tercatat telah berdiri sekolah swasta untuk bumiputra yang terletak di wilayah Rogojampi (*Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie* 1882;1883:98). Pendirian sekolah ini tidak terlepas dari kebutuhan akan pekerja-pekerja yang terampil untuk perusahaan-perusahaan perkebunan yang mulai bermunculan di Rogojampi. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa anggota komisi pendidikan untuk bumiputra saat itu, Meij van Gerwen, juga merupakan pemilik perusahaan

³ ANRI : *Algemeen Verslag der Residentie Banjoewangi Dienst Jaar 1828-1832*. Keberadaan sekolah ini juga dikonfirmasi tulisan Brugmans berdasarkan laporan pendidikan yang menyatakan bahwa di kurun waktu 1827-1833 terdapat guru swasta di Banyuwangi yang mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, lihat Brugmans 1938:108-109.

perkebunan Ardjo Blambangan yang terletak di Rogojampi.

Komisi pendidikan untuk bumi-putra sendiri dibentuk pada 1872. Komisi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengawasi sekolah-sekolah bumiputra yang ada mengingat antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Komisi ini diketuai oleh Residen Banyuwangi dan beranggotakan Raden Toemoenggoeng Prionggo-koesoemo (Bupati Banyuwangi sejak 1867), Jhr. H.J.A.S. De Meij van Gerwen (sebelumnya adalah anggota komisi pendidikan untuk sekolah Eropa) dan Raden Kerto Dirdjo (*Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie* 1882; 1873:363).

Sekolah swasta di Rogojampi bertahan sampai masa kebijakan Politik Etis. Sehingga secara keseluruhan, sampai berakhirnya abad XIX, hanya terdapat dua sekolah dasar untuk anak-anak bumiputra di Banyuwangi, yakni satu sekolah dasar milik pemerintah dan satu sekolah dasar milik swasta.

Perkembangan sekolah swasta mendapatkan momentumnya pada masa kebijakan Politik Etis ketika pemerintah membuka kesempatan yang lebih terbuka untuk pendirian sekolah swasta. Hal inilah yang menjadi pembeda antara masa kebijakan Politik Etis dengan masa sebelumnya. Kebijakan Politik Etis tidak hanya ditandai dengan semakin terbukanya izin pendirian sekolah untuk berbagai organisasi dengan standar tertentu akan tetapi juga merupakan dukungan kepada sekolah terutama pemberian secara finansial. Pada awalnya, pendirian sekolah berada di tangan pemerintah sepenuhnya. Hal ini seiring

dengan kelahiran dan keberadaan elite-elite modern yang menggerakkan atau menjadi bagian penting dari organisasi pergerakan pada waktu itu. Ciri ini menjadi pembeda yang signifikan dalam sejarah pendidikan di Indonesia secara umum dan Banyuwangi secara khusus.

Perkembangan organisasi pergerakan nasional pada 1920an hingga 1930an menunjukkan semangat kesadaran nasional yang semakin kuat. Di sisi lain, pemerintah kesulitan untuk menanggung sepenuhnya penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar dalam skala lebih luas. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan berbahasa Belanda dan mampu memberikan kesempatan pekerjaan yang lebih baik. Krisis ekonomi pada 1930an memberikan dampak besar dalam dunia pendidikan saat itu, terutama adanya pengurangan atau pemotongan anggaran di departemen pendidikan. Kebijakan ini berdampak pula ke daerah-daerah, terutama sekolah-sekolah milik pemerintah. Di Banyuwangi, beberapa sekolah pemerintah harus ditutup. Pada 1934 sebuah sekolah kelas dua di kampung Singomayan (Distrik Banyuwangi) harus ditutup (*De Indische Courant*, 1 Agustus 1934). Hal yang sama juga terjadi di Singojuruh (Distrik Rogojampi) dan Srono (Distrik Cluring). Sekolah kelas dua yang ada harus ditutup dan diubah menjadi sekolah desa dan sekolah lanjutan (*vervolgschool*). Selain itu di Genteng (di pusat distrik) yang sebelumnya terdapat dua sekolah kelas dua, salah satu di antaranya harus ditutup dan

diubah menjadi sekolah desa ditambah dengan *vervolgschool*. Di Distrik Genteng juga, tepatnya di wilayah Kalibaru, sebuah sekolah kelas dua ditutup. Bangunan yang ada akan digunakan untuk sekolah desa khusus perempuan (*meisjesdesaschool*). Para pengajar di sekolah-sekolah yang ditutup, dipindahkan pemerintah ke tempat lain yang memungkinkan atau dijadikan guru pengajar di sekolah desa dan *vervolgschool* yang baru dibentuk. Di sisi lain, sebagai kompensasi dari penutupan ini, pemerintah memberikan bantuan seperti penyediaan peralatan sekolah, kebutuhan belajar mengajar serta alat tulis bagi sekolah desa yang baru didirikan. Meskipun begitu, pengurangan ini pada akhirnya membuat fasilitas pendidikan yang ada di Banyuwangi semakin tidak mencukupi kebutuhan pendidikan masyarakat. Keadaan inilah yang mendorong sekolah swasta muncul dan berkembang lebih cepat. Pembahasan berikut terbagi ke dalam beberapa bagian yang didasarkan pada upaya-upaya dari tiap komunitas etnik atau sosial yang ada di Banyuwangi.

1. Upaya Komunitas Indo-Eropa di Tanah Kolonisasi

Wilayah Banyuwangi yang masih kosong, terutama bagian selatan, merupakan tujuan dari migrasi penduduk dari wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada akhir abad XIX dan awal abad XX seiring keberadaan perusahaan perkebunan.⁴ Perusahaan

perkebunan tidak hanya membutuhkan tenaga-tenaga terampil dari kalangan bumiputra akan tetapi juga dari kalangan Eropa ataupun Indo-Eropa. Pembukaan wilayah ini menjadi permukiman baru erat kaitannya dengan upaya kolonisasi baik dari perusahaan maupun pemerintah. Oleh karena itu wilayah ini disebut sebagai wilayah kolonisasi, yang secara sederhana merujuk pada pembukaan lahan baru atau pengubahan lahan kosong menjadi wilayah permukiman yang memiliki tujuan tertentu. Di Banyuwangi sendiri terdapat dua daerah kolonisasi, yakni Brassan dan Kesilir. Kedua tanah kolonisasi ini diupayakan swasta untuk kepentingan perusahaan perkebunan. Status tanah kolonisasi swasta membuat wilayah ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik itu pendidikan, kesejahteraan maupun kesehatan. Oleh karena itu, permasalahan yang dialami masyarakat terutama Indo-Eropa di sana tidak menjadi perhatian dari pemerintah. Keadaan ini pada dasarnya terjadi pada wilayah-wilayah permukiman baru yang didirikan swasta. Permukiman tersebar di daerah Banyuwangi bagian selatan seperti Rogojampi dan Glenmore. Ketiadaan fasilitas pendidikan merupakan salah satu bagian dari ketidakpuasan komunitas Indo-Eropa di Banyuwangi Selatan yang menganggap pemerintah tidak memberikan perhatian yang cukup sehingga mereka berada dalam keadaan yang sulit, terutama masalah finansial (*Bataviaasch Nieuwsblad* 15 Juni

⁴ Arus migrasi ini semakin besar seiring dengan pembukaan kereta api yang menghubungkan

Banyuwangi dengan berbagai wilayah di Jawa pada 1903.

1926).⁵ Padahal, terdapat 23 perusahaan perkebunan berada di wilayah ini, ditambah 8 perkebunan yang berhubungan kepemilikannya dengan perusahaan David Birnie.⁶ Menurut mereka, pemerintah tidak memberikan perhatian cukup, misalnya tidak ada satupun pegawai pemerintah dari kalangan Eropa yang bertugas di wilayah ini, serta asisten residen yang hampir tidak pernah berkunjung dan melihat keadaan mereka. Padahal Glenmore merupakan salah satu wilayah yang besar untuk perkebunan di Besuki. Berkaitan dengan kebutuhan pendidikan, mereka menginginkan adanya sekolah yang jaraknya lebih terjangkau oleh mereka. Selama ini, orang tua yang tidak mampu mengirimkan anaknya bersekolah di luar daerah harus menyekolahkan anaknya di Distrik Banyuwangi ataupun Jember, mengingat wilayah ini berada di antara Jember dan pusat Banyuwangi. Jarak ini (kurang lebih 50-60km) dianggap terlalu jauh untuk ditempuh anak-anak di usia sekolah (6-10 tahun) (*De Indische Courant* 18 Februari 1927).

⁵ Masalah lain yang menjadi perhatian utama selain pendidikan adalah masalah kesehatan. Disebutkan bahwa tidak ada dokter Eropa di wilayah itu, sehingga mereka harus membawa yang sakit jauh ke pusat Banyuwangi di mana setidaknya terdapat 2 dokter Eropa. Hal ini berat bagi mereka yang secara ekonomi tidak cukup baik.

⁶ Dalam laporan Mr. J. G. Van Hemert, seorang wakil inspektur Tenaga Kerja (Adjunct-Inspecteur van den Arbeid) pada 1916, disebutkan bahwa sampai 1915, tidak ditemukan satupun sekolah bagi anak-anak pekerja perkebunan di Banyuwangi yang didirikan oleh perusahaan perkebunan.

Anak-anak harus berangkat pukul 4 pagi dan harus menaiki bendi menuju stasiun terdekat untuk menaiki kereta pertama ke arah Banyuwangi. Biasanya mereka sampai di Banyuwangi pada pukul 7.40 pagi. Setelah itu mereka harus berlari sesegera mungkin atau menggunakan bendi untuk mengikuti kelas dari pagi sampai selesai. Setelah kelas selesai mereka harus menunggu untuk kereta kepulangan melalui rute perjalanan yang sama. Biasanya mereka baru sampai Glenmore paling cepat pada pukul 3 sore (*Soerabaijasch Handelsblad* 19 November 1935).⁷ Keadaan yang lebih buruk juga terjadi pada anak-anak yang lebih dewasa yang memulai kelas pada siang hari (pukul 10.00). Jadwal kereta yang tidak memungkinkan membuat mereka harus datang sedari pagi dan menunggu sampai kelas dimulai. Hal ini semakin buruk terutama ketika musim hujan, di mana mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak memiliki tempat berteduh, maka mereka harus menghadiri kelas dalam keadaan basah, dan harus bertahan sampai kelas selesai. Keadaan ini dianggap sangat tidak baik untuk anak-anak, karena mereka tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup, ditambah lagi

⁷ Permasalahan ini telah dicoba untuk diatasi oleh jawatan kereta api Staatsspoorwegen (S.S.), akan tetapi selalu gagal. Solusi yang dapat ditawarkan salah satunya adalah menggunakan kereta barang. Solusi penting diambil pada 1935 di mana pihak S.S. akan berupaya untuk mempercepat kedatangan di Banyuwangi. Berdasarkan perencanaan, kereta akan sampai di Banyuwangi pada pukul 07.20, sehingga anak-anak tidak perlu terburu-buru sampai di sekolah dan dapat belajar dengan tenang.

cuaca di Banyuwangi cukup buruk. Anak-anak tidak lagi memiliki waktu bermain yang cukup selepas sekolah, dan mengalami kelelahan untuk mempersiapkan kelas di hari selanjutnya. Hal inilah yang mendorong orang tua menuntut pendirian sekolah bagi anak-anak Indo-Eropa di wilayah sekitar perkebunan. Keluhan juga sempat disampaikan Perkumpulan Sekolah Banyuwangi (*Banjoewangische School Vereeniging*) pada 1931. Mereka mendesak pemerintah di Banyuwangi agar mendirikan sekolah dasar Eropa bagi anak-anak Kristen (*Soerabaijasch Handelsblad* 26 Juni 1931).

Kebutuhan sekolah ini juga tidak terlepas dari keberadaan komunitas Jawa-Kristen di bagian selatan Banyuwangi yang mayoritas merupakan pendatang dari Jawa Tengah serta komunitas Indo-Eropa yang bekerja di perkebunan. Sebelumnya, pada 1926, pemerintah pusat telah memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak jemaat Katolik Roma (*De Indische Courant* 16 Januari 1926). Bantuan ini diberikan kepada mereka yang tergabung dalam jemaat Katolik Roma di berbagai wilayah di Jawa bagian timur, seperti Pasuruan, Pamekasan, Gresik, dan Jombang. Bantuan ini diberikan juga di wilayah Jawa bagian tengah, seperti Banjarnegara, Temanggung, dan Purworejo. Adapun di Jawa bagian barat bantuan diberikan untuk wilayah Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, Tangerang dan Serang (*De Indische Courant* 16 Januari 1926). Bantuan yang diberikan pemerintah sebanyak 20 *gulden* per bulan diberikan sejak pertama kali sekolah beroperasi. Pemerintah daerah

dan perwakilan departemen pendidikan yang ada akan mengawasi pelaksanaan bantuan ini. Pendidikan bagi anak-anak ini akan tetap diberikan selama antusiasme masih baik, di mana setidaknya terdapat 10 anak yang masih mengikuti setiap kelasnya. Selain perkumpulan sekolah dan pemerintah, gereja dan *societeit* juga memiliki perhatian dalam upaya pemberian pendidikan bagi anak-anak Kristen di Banyuwangi. Seperti yang tercatat pada pertemuan bulan Februari 1926 di salah satu hotel di Kalibaru dan juga pertemuan di gedung *societeit* (*Soerabaijasch Handelsblad* 2 Februari 1934). Salah satu topik utama yang dibahas adalah pendidikan yang layak, utamanya bagi anak-anak pekerja perusahaan perkebunan. Mereka beranggapan bahwa anak-anak ini belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, mengingat jumlah mereka yang cukup besar serta ditambah lagi tidak adanya fasilitas sekolah yang cukup. Akan tetapi, belum tercatat hasil yang nyata dari rencana dalam pertemuan ini.

Usaha yang cukup penting diinisiasi organisasi Indo-Eropa Indo-Europeesch Verbond (IEV).⁸ Upaya ini telah dimulai sejak 1923, akan tetapi karena keterbatasan dana sampai awal 1930an sekolah ini belum dapat didirikan. Usaha ini sempat dilanjutkan oleh pekerja perusahaan perkebunan,

⁸ Pada dasarnya pemerintah telah menganjurkan mereka untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah bumiputra yang ada. Penolakan terjadi karena selain mereka tidak ingin anak-anaknya bersekolah di tempat yang sama dengan anak-anak bumiputra, mereka menganggap sistem pendidikan yang tidak cukup baik.

mengingat saat itu perusahaan perkebunan tidak mengambil tindakan yang cukup penting. Perkumpulan pengusaha perkebunan Nederlandsch Indie Plantersbond, sebenarnya pernah berupaya menginisiasi pendirian sekolah khusus anak-anak pekerja perkebunan dengan mendirikan Planters Onderwijs Vereeniging (POV) (*Soerabaijasch Handelsblad* 6 Desember 1933). Rencana organisasi ini adalah mendirikan sekolah di setiap pusat operasi perusahaan perkebunan. Namun rencana ini tampaknya tidak berjalan lancar, setidaknya seperti yang terjadi di Banyuwangi.

Keadaan ini mendorong salah satu pengusaha perkebunan bernama J.H. Behrns, yang terkenal sebagai pengusaha kaya yang memiliki ketertarikan besar dalam kegiatan sosial, untuk membantu pendirian sekolah yang sebelumnya telah digagas IEV pada 1932 (*Overzicht van de Inlandsche en Malesich-Chineesche Pers* 13 Februari 1932).⁹ Ia telah memberikan alokasi dana untuk pendirian sekolah dengan jumlah yang tidak disebutkan. Akan tetapi bantuan dana dari Behrns ini pada akhirnya harus dikembalikan karena pemerintah memutuskan untuk mengambil alih pembangunan sekolah. Dana yang diterima kembali oleh J.H. Behrns kemudian didonasikan kepada Dr. Soetomo setelah sebelumnya disetujui Gubernur di Jawa Timur. Dr. Soetomo saat itu memiliki lembaga yang bergerak di bidang bantuan pendidikan bagi anak-anak bumiputra

yang ingin bersekolah. Lembaga ini bernama Blambangan-Fonds, yang diresmikan pada 21 Mei 1926 (*Nieuwe Courant* 24 Juni 1949).¹⁰ Sekolah ini pada akhirnya berhasil didirikan pada 1933 dengan antusiasme yang tinggi sekaligus menjadi ELS kedua di Banyuwangi. Pada tahun pembukaannya, tercatat terdapat 120 anak yang bersekolah di sana. Besarnya antusiasme peserta didik tidak terlepas dari letak ELS di Glenmore. Glenmore menjadi salah satu tempat yang menjadi pusat tinggal orang-orang Indo-Eropa, mengingat di sana terdapat banyak perusahaan perkebunan. Selain itu, ELS Glenmore menjadi wakil dari ELS di wilayah selatan Banyuwangi yang banyak ditinggali orang-orang Eropa ataupun Indo-Eropa.

Antusiasme yang tinggi di sekolah ini berbanding terbalik dengan ELS di Distrik Banyuwangi, di mana jumlah murid terus mengalami penurunan sehingga jumlah guru juga harus dikurangi. Keadaan ELS di Distrik Banyuwangi ini mendorong pemerintah untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak Tionghoa dan bumiputra untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik di ELS. Dibukanya kesempatan ini selain untuk menjawab kebutuhan sekolah modern terutama bagi anak-anak bumiputra akan tetapi juga untuk mengurangi antusiasme anak-anak Tionghoa bersekolah di HCS.

⁹ Selain itu ia juga menjadi dewan daerah Banyuwangi (*Regentschapsraad van Banjoewangi*).

¹⁰ Selain mendirikan Blambangan Fonds, Dr. Soetomo juga merupakan pendiri PBI, yang kemudian juga bergerak dalam bidang pendidikan bagi anak-anak bumiputra.

Keadaan yang kurang lebih sama berkaitan dengan kebutuhan sekolah juga terjadi di wilayah koloni perkebunan yang lain di Banyuwangi. Anak-anak Indo-Eropa yang tinggal di wilayah kolonisasi Brassan-Kessilir juga harus menempuh perjalanan yang jauh (ke Banyuwangi) untuk ke sekolah. Oleh karena itu, setidaknya terdapat 20 anak yang tidak bersekolah selama bertahun-tahun karena keadaan yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk tetap bersekolah. Pemerintah kolonial di Banyuwangi tampaknya tidak cukup memberikan perhatian pada daerah ini, bisa jadi mengingat status daerah koloni Brassan sebagai daerah kolonisasi yang dibuat swasta (partikelir). Daerah kolonisasi yang didirikan partikelir tidak akan mendapatkan subsidi dari Dewan Kolonisasi (Syamsu 1960:69-70). Hal ini juga yang membuat kehidupan di wilayah kolonisasi ini menjadi sangat berat. Usaha pendirian sekolah pada akhirnya dilakukan IEV cabang Banyuwangi Selatan dan berhasil mendirikan sekolah pada 1935. Sekolah ini hampir sepenuhnya dikelola IEV melalui pengumpulan uang sumbangan (*De Indische Courant* 27 Juni 1935).¹¹ Lokasi pendirian sekolah ini adalah di kawasan koloni Brasan-Kesilir, yang saat itu merupakan bagian dari Distrik Genteng. Sekolah

yang didirikan berupa sekolah dasar Eropa (ELS) dengan jumlah murid ketika pertama kali dibuka pada Agustus sebanyak 20 anak dengan guru sebanyak 2 orang. Sekolah ini pada awalnya tidak mendapat bantuan subsidi dari pemerintah, oleh karena itu pada awalnya biaya ditanggung sepenuhnya oleh IEV.¹²

Keadaan ini membuat sekolah selalu mengalami defisit finansial setiap bulannya, terutama untuk masalah gaji guru. Oleh karena itu mereka selalu berupaya agar Departemen Pendidikan mampu memberikan bantuan, seperti peralatan bekas untuk mengajar dari sekolah-sekolah yang ada sebelumnya ataupun sekolah-sekolah yang ditutup. Mereka siap membayar dengan harga yang lebih murah. Peralatan yang dibutuhkan adalah bahan ajar, meja dan kursi kelas, peta, dan material kelas lainnya. Meskipun secara ekonomi sangat terbatas, akan tetapi sekolah ini sanggup beroperasi dengan membuka 3 kelas di awal. Kehadiran murid juga cukup baik mengingat jarak yang memungkinkan bagi anak-anak di usia sekolah. Pihak sekolah juga meminta orang tua yang anak-anaknya tidak bersekolah dan hanya bermain-main seharian untuk mendaftarkan diri ke sekolah. Pada Juni 1938, Residen Besuki dan ditemani Asisten Residen Banyuwangi saat itu mengadakan pertemuan dengan masyarakat Brassan di sekolah ini. Pertemuan ini merupakan bagian dari kegiatan kunjungan mereka ke wilayah kolonisasi Brassan. Pertemuan

¹¹ Presiden IEV untuk wilayah Banyuwangi Selatan berhasil mengumpulkan dana melalui sumbangan sejumlah beberapa ratus gulden (jumlah tidak disebutkan pasti). Dana yang terkumpul ini digunakan untuk membangun gedung sekolah dan membayar biaya untuk mendatangkan dan membayar guru yang ada.

¹² Presiden IEV untuk wilayah Banyuwangi Selatan berhasil mengumpulkan uang sampai beberapa ratus gulden. Uang inilah yang digunakan untuk mendirikan sekolah beserta peralatannya dan membayar gaji guru.

dihadiri juga oleh Wedono Blambangan dan pimpinan IEV cabang Banyuwangi selatan. Dalam pertemuan ini, masyarakat berkesempatan menyampaikan permasalahan dan permohonan mereka dengan harapan dukungan dan perhatian pemerintah yang lebih baik di masa mendatang. Sekolah-sekolah swasta inilah yang menjadi jawaban dari kebutuhan pendidikan bagi anak-anak Indo-Eropa saat itu di Banyuwangi bagian selatan.

2. Organisasi Pergerakan dan Pendirian Sekolah Bumiputra

Ide kesadaran nasional yang semakin kuat pada dasawarsa 1920-an pada akhirnya sampai ke Banyuwangi. Di Banyuwangi saat itu telah terdapat beberapa organisasi yang kuat peranannya dalam dunia pendidikan, seperti SI, PBI, Al Irsyad, dan Taman Siswa. Pendirian sekolah dasar yang cukup penting di masa ini, yang nantinya disetarakan sebagai *Particulier HIS* (PHIS) adalah pendirian sekolah Mardi Siswo pada 1928. Sekolah ini didirikan seorang dokter di Banyuwangi, Dr. R.M.S. Soedibjo (*De Indische Courant* 18 Juli 1932). Soedibjo sendiri merupakan penggerak PBI di Banyuwangi yang sekaligus menjadi inisiator kemunculan sekolah-sekolah swasta di Banyuwangi. Keberadaan sekolah ini merupakan bagian dari program pendidikan yang menjadi fokus dari PBI pusat di Surabaya. Sekolah ini juga didukung oleh perkumpulan yang dibuat dengan nama yang sama, untuk menyokong perkembangan sekolah, yang juga diketuai R.M.S. Soedibjo.

Pendanaan sekolah ini pada awalnya dikerjakan pihak swasta sepenuhnya melalui pendanaan organisasi atau sumbangan. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong perkembangan sekolah ini, pihak Mardi Siswo berupaya melakukan penggalangan dana melalui kegiatan Pasar Dharma, yakni sebuah kegiatan amal yang di dalamnya terdapat penjualan barang-barang tertentu. Kegiatan ini dihadiri petinggi-petinggi di Banyuwangi terutama orang-orang Belanda yang menjadi bagian dalam lembaga pemerintah dan sekolah Eropa. Keberadaan kegiatan Pasar Dharma ini tidak hanya dimaksudkan untuk penggalangan dana, akan tetapi juga untuk menggalang komunikasi yang baik dengan para petinggi pemerintahan di Banyuwangi serta petinggi lembaga pendidikan yang ada. Kegiatan Pasar Dharma ini menghasilkan dukungan yang besar terhadap pelaksanaan sekolah ini. Hal ini bertujuan agar sekolah yang akan berdiri mendapat persetujuan, bantuan, dan kesederajatan status dari hasil pendidikan nantinya. Selain dukungan dari elite pemerintah kolonial saat itu, dukungan juga datang dari bupati Banyuwangi yang menjadi penanggung jawab atau pelindung sekolah Mardi Siswo.

Kerjasama dengan pejabat lokal ini pada akhirnya berhasil mengubah status Mardi Siswo sebagai *Particulier HIS* (PHIS) yang secara resmi disahkan melalui Surat Keputusan Direktur Pendidikan No. 26759/B pada 3 Oktober 1935. Semangat kebangkitan pendidikan anak-anak bumiputra,

ditunjukkan R.M. Soedibjo, sebagai pimpinan dari organisasi sekaligus sekolah, dengan terlebih dahulu membuka kesempatan kepada pengajar-pengajar bumiputra untuk menjadi guru di Mardi Siswo, dengan syarat minimal merupakan lulusan dari sekolah guru Hollandse Kweekschool (HKS) (*De Indische Courant* 8 Juli 1931). Hal ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak bumiputra lulusan sekolah keguruan untuk mendapat pekerjaan yang baik dan terhormat serta mampu membuka wawasan anak-anak didik dan lingkungannya tentang manfaat yang besar dari adanya kesempatan bersekolah. Selain digunakan untuk sekolah dasar, gedung Mardi Siswo, digunakan juga untuk kegiatan belajar Meer Uitgebried Lager Onderwijs (MULO). MULO swasta ini juga diinisiasi Soedibjo, tetapi dengan organisasinya yang lain yakni PBI. Kegiatan MULO akan dilaksanakan pada sore hari, selepas kegiatan HIS, yakni pukul 4 sore sampai 9 malam. Pendirian MULO ini merupakan bagian dari program PBI Banyuwangi dalam bidang pendidikan.

Selain Mardi Siswo, di Distrik Banyuwangi juga terdapat Sekolah Dasar Adi Tomo (Adi-Tomo School). Tidak ditemukan tanggal berdirinya sekolah Adi Tomo, akan tetapi setidaknya sejak 1930 sekolah ini telah ada. Secara kualitas, sekolah ini setara dengan sekolah lanjutan (*schakelschool*). Kurikulum yang digunakan sama seperti kurikulum sekolah lanjutan pemerintah saat itu. Pada 1935, sekolah ini memiliki 4 guru dan murid-murid yang datang dari

lulusan sekolah kelas dua. Meskipun secara kualitas mirip seperti sekolah lanjutan, akan tetapi tujuan dari sekolah ini adalah meluluskan murid dengan memperoleh ijazah pada tes pegawai pemerintah rendah (*kleinambtenaars-diploma*). Ujian ini masih menjadi mimpi kebanyakan masyarakat pada waktu itu, tidak menutup kemungkinan dari luar golongan elite. Salah satu hasilnya adalah pada ujian pegawai rendah pemerintah di bulan Juni 1935, tercatat 3 murid Adi Tomo School berhasil lulus, bahkan salah satu lulusannya mendapatkan nilai sempurna dalam soal hitungan (*De Indische Courant* 17 Juni 1935).¹³

Upaya lain juga muncul di Genteng pada 1933. Sebuah organisasi bernama Pendidikan Penduduk Blambangan (PPB) berhasil mendirikan sekolah dasar pada bulan Juli 1933 (*De Indische Courant* 23 Juli 1934).¹⁴ Organisasi ini sendiri berdiri pada 1933 atas inisiasi Wedono Genteng saat itu dan beranggotakan priayi-priayi, kepala desa, dan beberapa tokoh di Distrik Genteng. Tujuan organisasi ini adalah mempromosikan pendidikan bagi anak-anak bumiputra di Genteng. Hal ini dianggap penting mengingat Genteng bukanlah wilayah pusat dari Regentschap

¹³ Mereka yang lulus, bernama Soedarsono, Soewarso, dan Soekarno. Soekarno adalah siswa yang mendapat nilai sempurna dalam soal hitungan.

¹⁴ Pada waktu perayaan satu tahun berdirinya sekolah, diadakan pesta di Kawedanan Genteng yang diisi dengan pertunjukan tayuban dan gandrung. Pesta ini dihadiri kepala desa yang ada di Genteng dan sekitarnya serta tamu-tamu Eropa dari Banyuwangi.

Banyuwangi sehingga fasilitas pendidikan yang ada tidaklah sebanyak Distrik Banyuwangi sebagai pusat *regentschap*. Sekolah yang berhasil mereka dirikan berada dalam tingkat sekolah dasar Eropa. Oleh karena itu, secara kualitas sekolah ini sama dengan sekolah-sekolah swasta di Banyuwangi. Selain itu guru yang bertugas memimpin sekolah ini adalah seorang guru Eropa dengan ijazah utama, yakni Mr. Bijl. Antusiasme pada sekolah ini sangatlah besar, terbukti dalam waktu 1 tahun jumlah murid di sekolah ini mencapai 110 anak yang berasal dari golongan bumiputra mayoritas dan juga beberapa anak-anak golongan Tionghoa. Biaya yang dikenakan bagi setiap anak adalah 1,5 *gulden*.

Sekolah terakhir yang cukup penting adalah Taman Siswa. Sejak didirikan pertama kali pada 1922, Taman Siswa menyebar dengan cepat ke berbagai daerah. Taman Siswa pertama kali hadir di Banyuwangi pada 1929, tepatnya di Cluring. Sekolah ini dibuka pada 1 Juli 1929 dengan 50 murid dan 1 guru bernama R. Ngoesmanadji (*Wasita* 1929 No. 9-10, Juni-Juli). Dari sinilah Taman Siswa berkembang ke beberapa wilayah lainnya di Banyuwangi.¹⁵ Taman Siswa di Banyuwangi terlibat aktif dalam kegiatan taman siswa secara umum. Sistem pendidikan yang ada juga

kurang lebih sama dengan Taman Siswa pusat, seperti sistem *among* dan perguruan yang terbagi dalam beberapa beberapa kelompok, Taman Indria, Taman Muda, Taman Dewasa, dan Taman Madya. Pada rapat pimpinan Taman Siswa (29-30 Oktober 1932) dalam rangka menanggapi kebijakan sistem ordonansi (*onderwijs ordonantie*) pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, Taman Siswa membentuk golongan-golongan yang akan mengurus setiap cabang yang ada. Taman Siswa Banyuwangi masuk dalam golongan (kelompok) Blambangan. Penggunaan nama ini merupakan bentuk protes dari pimpinan Taman Siswa atas kebijakan ordonansi yang dianggap merugikan (Majelis Luhur Taman Siswa 1956:230-232).¹⁶ Taman Siswa di Banyuwangi berhasil menarik minat masyarakat lokal untuk menyekolahkan anak-anaknya, salah satu alasan utamanya adalah biaya yang lebih murah. Keberadaan Taman Siswa terbukti masih tetap bertahan jauh setelah kemerdekaan. Berkembangnya sekolah-sekolah swasta di Banyuwangi ini pada dasarnya tidak terlepas dari komitmen bupati saat itu

¹⁵ Berdasarkan ingatan Hasnan Singodimayan, di Banyuwangi kota terdapat satu sekolah Taman Siswa di daerah Temenggungan pada awal kemerdekaan (wawancara Hasnan Singodimayan). Selain itu, tercatat juga sekolah Taman Siswa di Genteng dan Pedotan. Lihat Ermi Liahana, "Dinamika Taman Siswa di Banyuwangi (1954-2013)."

¹⁶ Beberapa nama cabang yang diubah adalah Mataram sebagai pengganti Yogyakarta, Jakarta pengganti Batavia, dan Badung pengganti Denpasar. Penggunaan nama-nama tersebut sebagai bentuk pertentangan kepada yang berbau kolonial dan juga untuk menunjukkan sifat kebesaran bangsa Indonesia. Salah satu keputusan dalam rapat itu adalah sikap penolakan dari Taman Siswa atas kebijakan ordonansi pemerintah, larangan untuk membuka sekolah dan mengangkat guru baru, dan pemberian instruksi sejelas-jelasnya agar Taman Siswa dapat selamat.

yang akan mendukung pendirian sekolah swasta dalam bentuk bantuan dana (*Soerabaijasch Handelsblad* 13 November 1933). Seperti halnya Mardi Siswo yang secara langsung dilindungi bupati, beberapa sekolah swasta juga mendapatkan bantuan dana, seperti *Particuliere HIS* baik di Banyuwangi, Rogodjampi, maupun Genteng. Begitu juga sekolah kerajinan yang tersebar di Banyuwangi. Hal ini menjadi salah satu alasan sekolah swasta terus berkembang di Banyuwangi.

Kemunculan sekolah dari organisasi-organisasi bumiputra saat itu mendorong organisasi Islam yang telah menyebar di Banyuwangi untuk mendirikan sekolah. Dalam konteks sosial, selain organisasi bumiputra yang bersifat nasionalis (non-agama), organisasi Islam juga memiliki peran penting. Sekolah-sekolah ini merupakan bagian dari gerakan organisasi Islam yang ada di Banyuwangi kala itu yang memiliki fokus perjuangan pada perbaikan keadaan anak-anak Islam saat itu, meskipun mayoritas berangkat dari komunitas Arab.

Pada 16 Januari 1935, sebuah sekolah modern didirikan di Banyuwangi, tepatnya di wilayah Lateng. Pembukaan sekolah dihadiri Wedana Banyuwangi (*De Indische Courant* 19 Januari 1935). Sekolah ini didirikan organisasi Al Hidajah Al Islamiah dan menyebut dirinya sebagai sekolah modern Arab yang memadukan sistem pendidikan Belanda (*Moderne Arabische School met Nederlandsch*). Beberapa mata pelajaran yang diberikan sama dengan mata pelajaran di sekolah Belanda, seperti aritmatika,

geometri, geografi, dan bahasa Belanda, serta diajar seorang guru yang memiliki banyak pengalaman. Di awal pembukaannya terdapat 70 murid yang terbagi ke dalam 6 kelas. Kebanyakan murid sekolah ini berasal dari sekolah Al Irshad yang juga ada di Banyuwangi. Banyaknya murid Al Irshad yang bersekolah di sana disebabkan kepala sekolah yang ada pernah menjabat sebagai kepala sekolah di Al Irshad. Tujuan dari pendirian sekolah ini adalah menciptakan tenaga terdidik yang memiliki wawasan Islam yang baik dan memiliki pengetahuan modern yang baik. Tujuan ini merupakan bagian dari semangat asosiasi organisasi Islam yang ada di Banyuwangi saat itu. Beberapa organisasi Al Irshad dan PSI, ditambah dengan PBI dan PMI hadir dalam pembukaan sekolah ini. Keempat organisasi yang hadir menyatakan persetujuan dan melakukan ikrar kerjasama di antara mereka.

Sebenarnya kehadiran sekolah modern Al Hidajah ini bukanlah yang pertama di Banyuwangi. Beberapa sekolah Islam modern juga telah hadir di Banyuwangi, seperti Al Irshad, Muhammadiyah, Sekolah Sarekat Islam, dan Al Khairiyah. Pendirian sekolah Muhammadiyah tidak terlepas berdirinya cabang Muhammadiyah di Banyuwangi pada 1933. Begitu juga dengan Al Irshad yang telah hadir di Banyuwangi sejak 1928. Muhammadiyah sendiri pertama kali mendirikan cabangnya di wilayah Banyuwangi adalah pada 1922 bersamaan dengan Situbondo (Tim 2004:46-50). Keberadaan Muhammadiyah tidak terlepas dari para imigran dari Jawa Tengah yang mayo-

ritas mengisi wilayah Banyuwangi bagian selatan, seperti halnya cabang Muhammadiyah di Genteng yang didirikan para pendatang dari Yogyakarta (Subekti 2017:11).

Peran para pendatang ini tidak terlepas dari penolakan ulama tradisional terhadap Muhammadiyah.¹⁷ Al Irsyad sendiri mendirikan cabangnya di Banyuwangi pada 1926 (Badjerei 1996:104).¹⁸ Satu tahun setelahnya berdiri sekolah (madrasah) yang diketuai Ustadz Sultan Ghalib Tebe yang kemudian dibantu Ustadz Abdullah Ali Baraba, Ustadz Ahmad bin Abubakar Bawazir dan Ustadz Ahmad bin Ghalib bin Tebe. Dua tahun berselang baru didirikan cabang Al Irsyad di Bondowoso. Al Irsyad kemudian bergabung bersama sekolah-sekolah modern Islam lainnya di Banyuwangi seperti Muhammadiyah dan Al Hidayah. Cabang Muhammadiyah sendiri pertama kali muncul di Distrik Banyuwangi pada 13 Oktober 1933 dan tidak berselang lama juga hadir sekolah Muhammadiyah. Hal yang penting dari keberadaan Muhammadiyah adalah sekolah khusus untuk perempuan yang setidaknya telah ada sejak 1935. Sekolah Diniyah Putri menjadi sekolah modern untuk perempuan pertama di Banyuwangi.

Sebenarnya, sebelum berdiri sekolah putri Muhammadiyah, di daerah Rogojampi telah berdiri Sekolah Rukun Wanito yang didirikan oleh organisasi dengan nama yang sama. Rukun Wanito merupakan organisasi perempuan yang didirikan di Rogojampi dan berada dalam perlindungan dan pengawasan dari pemerintah lokal (*inhemsche bestuur*). Organisasi ini didirikan pada 1933 dan diketuai Mrs. Slamet Soedibjo (*De Indische Courant* 15 Juni 1934).¹⁹ Sekolah perempuan yang didirikan Rukun Wanito adalah sekolah keterampilan seperti kerajinan tangan, merajut, dan menjahit. Sekolah ini tercatat mendapatkan subsidi dari pemerintah bersamaan dengan sekolah Particuliere HIS di Rogojampi dan Genteng pada 1933 (*Soerabaijasch Handelsblad* 13 November 1933). Hasil kerajinan tangan dari sekolah ini dihadirkan pada pameran dan pasar tahunan yang digelar Rukun Wanito, seperti misalnya pada 1934 di mana Rukun Wanito mengadakan acara pasar tahunan di pendopo Kawedanan Rogojampi. Beberapa kerajinan tangan yang dijual seperti sulaman atau rajutan pakaian anak-anak, topi, tas, dan

¹⁷ Setelah kunjungan yang dilakukan para petinggi Muhammadiyah ke Banyuwangi, disebutkan mereka mengalami beberapa ancaman, utamanya pimpinan Muhammadiyah saat itu K.H. Ahmad Dahlan.

¹⁸ Pada waktu itu telah ditunjuk Sayyid Awad b. Sholah Lahmadi sebagai ketua, dibantu dengan Ali b. Said Bawazir sebagai sekretaris, Ja'far b. Abdullah Alkatiri sebagai bendahara.

¹⁹ Semboyan atau semangat berdirinya organisasi ini adalah "wanita berjuang untuk persatuan dan emansipasi". Pada kegiatan pameran yang dihelat di Bioskop Srikandi pada 3 Juni 1934, mereka menyuguhkan karya-karya dari anggota mereka memiliki keindahan dan kegunaan. Secara tidak langsung, karya tersebut memberikan kesan kemauan, semangat, dan keterampilan anggota asosiasi ini yang terus melangkah untuk emansipasi dan pemajuan kelompok perempuan. Pada kegiatan ini hadir kalangan Eropa yang menunjukkan ketertarikan dan simpati terhadap gerakan organisasi ini.

pakaian bayi. Hasil karya siswi-siswi ini menarik minat yang cukup besar utamanya dari kalangan elit lokal (*De Indische Courant*, 7 Mei 1934). Selain itu, organisasi ini ikut terlibat secara aktif pada acara-acara kota, terutama yang berkaitan dengan kegiatan sekolah-sekolah untuk anak-anak bumiputra, seperti pesta yang digelar *Particuliere HIS Banyuwangi* pada bulan November 1935. Keterlibatan Rukun Wanito tidak terlepas dari keberadaan Mrs. Sudibjo yang bersama dengan suaminya terlibat aktif dalam kegiatan PBI di Banyuwangi.

3. Pengusaha dan Pendirian Sekolah Tionghoa

Kebutuhan sekolah adalah kebutuhan yang mendesak bagi orang-orang Tionghoa di Banyuwangi, mengingat sampai berakhirnya pemerintah kolonial, tidak terdapat satupun sekolah untuk anak-anak Tionghoa. Padahal di satu sisi, komunitas Tionghoa di Banyuwangi merupakan salah satu komunitas yang terbesar di keresidenan Besuki. Di dekade awal abad XX, sejauh yang tercatat, jumlah penduduk Tionghoa di Banyuwangi selalu lebih banyak dibandingkan dengan Jember, misalnya dari 1908 sampai 1916 jumlah penduduk Tionghoa di Banyuwangi mencapai 569 jiwa sedangkan Jember hanya sebesar 191 jiwa (*Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie* 1916/1917:9). Akan tetapi di Jember terdapat sebuah *Hollandsche Chineesche School* (HCS) yang menjadi satu-satunya sekolah untuk anak Tionghoa saat itu di keresidenan Besuki. Dalam hal ini, tampaknya pemerintah tidak memiliki ketertarikan

yang cukup terhadap pendidikan bagi anak-anak Tionghoa di Banyuwangi. Pemerintah beranggapan bahwa anak-anak Tionghoa seharusnya masuk dalam sekolah yang sama dengan anak-anak bumiputra baik HIS ataupun ELS.

Keengganan pemerintah dan permintaan untuk mendirikan fasilitas pendidikan yang semakin besar di kalangan Tionghoa pada akhirnya mendorong upaya inisiasi dari pihak swasta. Upaya pendirian *Particuliere Hollandsche Chineesche School* (PHCS) oleh dua orang pedagang Tionghoa di Genteng, yakni Mr. Liem Tiek Hm dan Tan Ek Tjong. Sekolah ini dibuka pada 1 Agustus 1933 dengan jumlah murid sebanyak 40 orang yang diajar oleh dua kompeten (satu orang guru Eropa dan satu guru perempuan Ambon yang telah diubah statusnya sebagai orang Eropa) (*De Indische Courant* 5 Agustus 1933). Kedua pedagang ini menyewa sebuah gedung dan mengubahnya menjadi gedung sekolah. Biaya yang dikenakan untuk masing-masing anak berkisar antara 1,5 *gulden* sampai 5 *gulden* per bulan. Defisit biaya dan seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Mr. Liem Tiek Hm. Kurikulum yang digunakan di sekolah ini adalah kurikulum yang sama yang dipakai PHCS yang ada di Distrik Banyuwangi di mana kurikulum ini dianggap paling tepat dan efektif. Tidak terdapat tanggal yang pasti mengenai pendirian PHCS di Banyuwangi. Kemungkinan terbesar karena HCS ini merupakan milik swasta, sehingga tidak terdapat dalam laporan pemerintah kolonial.

Selain PHCS yang menjadi sekolah khusus bagi komunitas Tionghoa di Banyuwangi, terdapat juga sekolah yang didirikan Tiong Hoa Hwe Kwan (THHK). THHK merupakan organisasi besar Tionghoa pada masa itu, sehingga cabang-cabangnya bermunculan di berbagai tempat. Setidaknya pada 1936 telah tercatat sekolah THHK pada acara kota Perayaan Ratu Belanda-Koninginne-Feesten di Banyuwangi (*De Indische Courant* 28 Agustus 1936). Sekolah THHK di Glenmore dikenal dengan nama THHK 330 (yang berarti sekolah ke-330 yang didirikan). Tidak ditemukan tanggal pasti berdirinya sekolah ini, akan tetapi setelah kemerdekaan sekolah ini berubah menjadi Sekolah Negeri Tri Tunggal (Firmansyah dan Fardian 2019:89-93).

4. Sekolah dan Acara-Acara Kota

Sekolah-sekolah swasta yang beragam ini bertemu dan berkegiatan bersama pada acara-acara kota. Acara-acara kota yang dimaksud adalah kegiatan yang melibatkan sekolah-sekolah yang ada, baik milik pemerintah maupun swasta di seluruh Banyuwangi untuk peringatan suatu acara tertentu. Kegiatan ini dapat berupa perlombaan ataupun pentas kesenian. Salah satunya adalah perayaan pesta pernikahan Princess Juliana dan Pangeran Bernhard yang dimulai pada 7 Januari 1937. Acara ini dilaksanakan di setiap distrik di Banyuwangi. Pembukaan acara dilakukan di alun-alun Kota Banyuwangi. Sebuah acara *slametan* yang besar diadakan tepat di depan kediaman bupati. Acara kemudian dilanjutkan dengan pasar malam yang di dalamnya

juga diisi dengan kompetisi gandrung. Pada keesokan harinya, acara bersifat umum. Anak-anak sekolah mengikuti permainan tradisional, pertandingan sepak bola dan sepeda hias. Hari kedua ditutup dengan pesta kembang api. Karnaval diikuti dengan pertunjukan musik dan perlombaan perahu dayung yang dimulai dari Sukowidi dan berakhir di jembatan Jalan Pantai Boom. Kegiatan yang sama dilakukan di daerah Benculuk, Genteng, Kalibaru, dan Glenmore. Setiap distrik akan mengadakan acara selamatan, pasar malam, dan juga permainan tradisional yang dimeriahkan anak-anak sekolah. Hanya satu kegiatan yang berbeda, yakni parade orang-orang Tionghoa yang diadakan di Kalibaru.

Kegiatan yang diikuti anak-anak sekolah sebenarnya pernah tercatat setahun sebelumnya (*De Indische Courant* 28 Agustus 1936). Kegiatan ini diadakan oleh Oranje Komite. Pada acara ini, anak-anak sekolah terlibat dalam kegiatan jalan santai, pertandingan kasti, dan menonton film di bioskop. Beberapa sekolah yang terlibat dalam kegiatan jalan santai adalah THHK, Vervolg en Volksschool Dandangwiring, HIS, Al Hidayah, Moderne Arabische School, Aditomo, ELS, Volksschool Lateng, Barogan, Glagah, dan Vervolgschool Pakis dan Giri, PHCS, PHIS, dan Al Irsyad. Setelah itu, diadakan kegiatan menonton film di bioskop yang terbagi ke dalam 3 sesi: sesi pertama diikuti anak-anak dari sekolah PHIS, Aditomo, Vervolgschool Lateng, Volksschool Dandangwiring, Glagah, dan Pakis, serta HIS, sesi kedua diikuti ELS, HIS, PHCS, Al Irsjad, Al Hidayah,

Vervolgschool Giri dan Glagah, dan sesi ke tiga diikuti sekolah Adi Tomo, THHK, *Volkschool* Lateng, Dandangwiring, Pakis, dan PHIS. Film yang diputar pada acara itu adalah *Emile en zijn Detectives* (Emile dan detektifnya).

Pesta untuk penghormatan kepada Ratu Belanda pernah juga dilakukan pada pada 1930 (*De Indische Courant* 27 Agustus 1930). Acara ini utamanya diadakan untuk pesta anak-anak sekolah dan dikerjakan masyarakat serta pegawai pemerintah bumiputra (*inlandsche ambtenaren*). Peserta dalam kegiatan ini berasal dari beberapa sekolah. HIS mengirimkan dengan 261 peserta, PHCS mengirimkan 108 peserta dan ELS mengirimkan 125 peserta. Selain sekolah-sekolah tersebut, peserta juga datang dari sekolah-sekolah desa ataupun *vervolgschool*, seperti Dandangwiring yang mengirimkan 200 peserta, Singomayan dengan 156 murid, Lateng dengan 170 anak, PHIS Adi Tomo dengan 93 peserta dan Al Irshad sebagai perwakilan sekolah Islam yang mengirimkan 80 peserta. Kegiatan dimulai dengan berkumpul di Alun-Alun Timur pada hari Sabtu, 21 Agustus 1830, kemudian dilanjutkan dengan jalan bersama ke Alun-Alun Barat. Pada pukul 9-11 pagi diadakan lomba, seperti jalan mundur, balap sepeda, *ayam-ayam*, dan telur berjalan. Pada hari Minggu, acara dimulai dengan pertandingan *korfball*²² pada pukul 8 pagi (antara ELS melawan HIS dan

dilanjutkan dengan Al Irsyad melawan Adi Tomo. Kegiatan ini ditutup dengan pertandingan kasti antara Dandangwiring melawan Lateng. Kegiatan perlombaan seperti ini juga kerap diadakan sekolah-sekolah Islam yang ada di Banyuwangi, seperti misalnya pertandingan sepak bola antara anggota kepanduan Muhammadiyah (Hizbul Wathan) dengan Al Irsyad (*De Indische Courant* 12 Oktober 1933). Lebih dari itu, kegiatan ini juga mengundang grup-grup kepanduan dari beberapa daerah seperti Bondowoso, Situbondo, Jember dan Kalisat, yang datang dengan kereta cepat dan menginap di sekolah PSI di daerah Karangbaru.

5. Larangan Mengajar Bagi Guru yang Dianggap “Berbahaya”

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah baik pemerintah kepada sekolah swasta, memiliki konsekuensi yang cukup jelas, yakni pemerintah melakukan pengawasan yang ketat kepada setiap penyelenggaraan sekolah ataupun guru-guru yang ada. Hal ini secara umum merupakan kebijakan pemerintah untuk memastikan sekolah ataupun guru tidak melakukan tindakan ataupun pengajaran yang dapat membahayakan pemerintah secara politik. Seperti misalnya, kebijakan ordonansi sekolah yang melahirkan “sekolah-sekolah liar”. Sejauh tercatat, sekolah-sekolah swasta di Banyuwangi merupakan sekolah-sekolah yang “mendapatkan persetujuan” dari pemerintah.

²⁰ Sejenis olahraga bola tangan yang digabungkan dengan basket. Olahraga ini dimainkan dengan masing-masing tim terdiri 8 pemain (4 laki-laki dan 4 perempuan). Olahraga ini ditemukan dan sangat populer

di Belanda dan menjadi bagian dari cabang olahraga pada Olimpiade 1920. Olahraga ini tidak cukup populer di Indonesia saat ini.

Hal ini dikarenakan sekolah swasta yang ada secara umum merupakan jawaban atas permintaan sekolah modern yang sangat tinggi yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah.

Secara umum, sekolah swasta memiliki sistem pengajaran yang sama dengan sistem pengajaran di sekolah pemerintah. Akan tetapi beberapa guru sekolah swasta, terutama sekolah Islam, tercatat mendapatkan pelarangan mengajar oleh pemerintah. Seorang guru di sekolah Sarekat Rakyat di Glenmore bernama Adiwisastra atau Ibnu dilarang mengajar dalam waktu yang tidak ditentukan dengan pertimbangan untuk menjaga ketertiban umum (*De Indische Courant* 14 Desember 1925). Pelarangan ini didasarkan pada keputusan Residen Besuki yang tercatat dalam *Staatsblad* 1923 No. 136. Pelarangan yang kurang lebih sama juga pernah diterima guru di sekolah Muhammadiyah di Srono, Banyuwangi bernama Mudjiardjo. Hal ini disebabkan Mudjiardjo dianggap telah mengganggu keamanan dan kepentingan umum karena ia mengajarkan lagu-lagu yang sifatnya menghasut kepada siswa-siswi di sekolah (*Het Volksdagblad: Dagblad voor Nederland* 12 April 1940).²¹ Sebelum bergabung sebagai guru di sekolah Muhammadiyah, Mudjiardjo merupakan staf sekolah swasta yang

didirikan Balai Pengajaran dan Pendidikan Islamiyah di Srono. Akan tetapi sekolah dan yayasan ini telah ditutup pemerintah Jawa Timur.

Pengawasan yang ketat oleh pemerintah untuk pergerakan organisasi Islam bukanlah hal baru. Bersama dengan masuknya migran dari Jawa Tengah yang banyak membawa anggota SI di dekade awal abad XX, pemerintah telah memberikan fokus dan perhatian lebih terhadap penyebaran SI.²² Keberadaan SI memang dianggap penting karena agitasi politiknya yang kuat. Dalam laporan yang sama, di kurun waktu itu hampir semua guru bumiputra merupakan anggota dari SI. Keberadaan sekolah-sekolah Islam seolah melengkapi pergerakan organisasi-organisasi swasta di Banyuwangi. Oleh karena itu, perkembangan sekolah yang cukup pesat di Banyuwangi ini, secara tidak langsung menunjukkan pengaruh yang signifikan dari keberadaan sekolah modern. Pengaruh pendidikan setidaknya terlihat pada organisasi-organisasi modern yang ada di Banyuwangi, seperti SI, PBI, Muhammadiyah, dan Al Irsyad yang sifatnya nasional hingga organisasi yang sifatnya kedaerahan seperti Adi Tomo, Rukun Wanito, PBB, Balai Pengajaran dan Pendidikan Islamiyah. Selain itu pendidikan modern juga tercatat menjadi bagian dari kemunculan elite-elite lokal modern.

²¹ Bersama dengan Mudjiardjo, dalam keputusan pelarangan ini juga tercatat seorang guru sekolah Tionghoa (THHK) di Bondowoso bernama Tan Siek Kie atau Tan Hwie Liat. Keputusan ini dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur.

²² ANRI. Arsip MvO seri DL reel No. 02. *Memorie van Overgave van den Aftredenden*, R.

D. SIMPULAN

Lambatnya upaya pemerintah kolonial untuk mendirikan sekolah dijawab dengan tindakan proaktif baik oleh pengusaha ataupun organisasi-organisasi yang ada saat itu. Organisasi pergerakan nasional dan swasta secara aktif berupaya mendirikan dan menyebarkan sekolah modern di Banyuwangi pada masa kebijakan Politik Etis. Upaya aktif ini tidak semata-mata hanya dengan mendirikan sekolah, akan tetapi juga menjalin kerja sama dan mengajukan persetujuan kepada pemerintah kolonial ataupun pejabat lokal. Hal ini terlihat, misalnya, ketika pendirian sekolah oleh PBI yang mengundang keterlibatan elite pemerintah Belanda di Banyuwangi saat itu. Secara tidak langsung mereka mengajukan perizinan agar sekolah ini dianggap sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sehingga lulusannya dapat diakui dan dapat bekerja sebagaimana lulusan sekolah pemerintah yang ada. Cara ini terjawab dengan perizinan yang ada, seperti perubahan status menjadi PHIS, menghadirkan guru-guru sekolah pemerintah, serta melibatkan sekolah-sekolah swasta untuk acara pemerintah. Selain itu bantuan dari pejabat lokal yang secara langsung menjadi penanggung jawab untuk sebagian sekolah swasta yang ada, pengawas perkembangan sekolah dan pemberi bantuan pendanaan untuk memastikan sekolah yang ada dapat berjalan dengan baik. Sekolah-sekolah swasta yang ada menjalin kerja sama dan saling mendukung satu sama lain. Hal ini dimaksudkan agar sekolah swasta yang ada dapat berkembang dengan baik

dan dapat menjawab kebutuhan sekolah yang semakin besar dari masyarakat. Beberapa alasan inilah yang membuat sekolah swasta dapat berkembang dengan baik di Banyuwangi, selain karena faktor sosial, politik, dan ekonomi yang ada saat itu.

Organisasi pergerakan seperti PBI, Al Irsyad, Muhammadiyah, dan organisasi lokal seperti PBB menjadi penggerak utama dari penyebaran sekolah modern untuk anak-anak bumiputra. Kebutuhan pendidikan anak-anak Indo-Eropa dipenuhi oleh IEV sebagai motor utama. Sedangkan untuk anak-anak Tionghoa, pengusaha Tionghoa yang ada di Banyuwangi secara aktif mendirikan dan memastikan berjalannya sekolah-sekolah swasta yang mereka miliki. Sekolah-sekolah swasta yang ada di Banyuwangi pada dasarnya menjawab kebutuhan yang sama, yakni kesempatan untuk mendapatkan pendidikan modern dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak baik di pemerintahan maupun di swasta bagi setiap golongannya. Standar kurikulum, sistem sekolah, akses terhadap guru-guru pemerintah yang tersertifikasi, serta akses pekerjaan untuk lulusannya merupakan aspek penting yang harus diusahakan. Hal inilah yang membuat sekolah yang ada berupaya untuk menjalin kerja sama dan komunikasi yang baik dengan pejabat-pejabat pemerintah. Secara tidak langsung upaya dan perkembangan ini menjadi bagian dari kelahiran masyarakat modern kolonial di Banyuwangi saat itu.

DAFTAR SUMBER

- Algemeen verslag van den staat van het schoolwezen in Nederlandsch-Indie 1854*. Batavia: Ter Lands Drukkerij.
- Algemeen verslag van den staat van het schoolwezen in Nederlandsch-Indie 1860*. Batavia: Ter Lands Drukkerij.
- Anonim. 1926. "Onderwijs en Gezondheidsdienst in Zuid-Banjoewangi: van Onzen Oosthoek Correspondent." *Bataviaasch Nieuwsblad*, Juni, 15.
- ANRI. 1913. *Memorie van Overgave Resident van Besoek*. J Bosman.
- ANRI, *Algemeen Verslag der Residentie Banjoewangi Dienst Jaar 1829-1833*.
- Badjerei, Hussein H. 1996. *Al-Irsyad Mengisi Sejarah Bangsa*. Jakarta: Presto Prima Utama.
- Brugmans, I. J. 1938. *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie*. Groningen: Batavia.
- De Indische Courant*. 1934, 1 Agustus.
- De Indische Courant*. 1933, 12 Oktober.
- De Indische Courant*. 1925, 14 Desember.
- De Indische Courant*. 1926, 16 Januari.
- De Indische Courant*. 1935, 17 Juni.
- De Indische Courant*. 1927, 18 Februari.
- De Indische Courant*. 1927, 18 Februari.
- De Indische Courant*. 1932, 18 Juli.
- De Indische Courant*. 1934, 23 Juli.
- De Indische Courant*. 1930, 27 Agustus.
- De Indische Courant*. 1935, 27 Juni.
- De Indische Courant*. 1936, 28 Agustus.
- De Indische Courant*. 1933, 5 Agustus.
- De Indische Courant*. 1934, 5 Juni.
- De Indische Courant*. 1934, 7 Mei.
- De Indische Courant*. 1931, 8 Juli.
- De Indische*. 1935, 19 Januari.
- Firmansyah, Arif dan M. Iqbal Fardian. 2019. *Glenmore: Sepetak Eropa di Tanah Jawa*. Banyuwangi: Historica Glenmore.
- Frankema, Ewout. 2013 "Why was the Dutch Legacy so Poor? Educational Development in the Netherlands Indies 1871-1942." *Masyarakat Indonesia* 39(2):307-326.
- Furnivall, J.S. 1943. *Educational Progress in Southeast Asia*. New York: International Secretariat Institute of Pasific Relation.
- Het volksdagblad*. 1940, 12 April.
- Liahana, Ermi. 2015. "Dinamika Taman Siswa di Banyuwangi (1954-2013)." Skripsi, Universitas Jember. Jember.
- Makmur, Djohan, dkk. 1993. *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman*

- Penjajahan*. Jakarta: CV. Manggala Bhakti.
- Margana, Sri. 2012. *Ujung Timur Jawa, 1763-1813: Perebutan Hegemoni Blambangan*. Yogyakarta: Pustaka Ifada.
- Majelis Luhur Taman Siswa. 1956. *Taman Siswa 30 Tahun*. Yogyakarta: Taman Siswa.
- Nasution, S. 2008. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nieuwe Courant*. 1949, 24 Juni.
- Overzicht van de inlandsche en Malesich-Chineesche Pers*. 1932, 13 Februari.
- Penders, Christiaan Lambert Maria. 1968. "Colonial Education Policy and Practice in Indonesia: 1900-1942." Disertasi, Australian National University, Australia.
- Rapport in zake de werkvolkwestie in Banjoewangi*. 1916.
- Regeerings-almanak voor Nederlandsch-Indie*. 1873.
- Regeerings-almanak voor Nederlandsch-Indie*. 1882.
- Regeerings-almanak voor Nederlandsch-Indie*. 1916.
- Rothrock, Willy. 1975. "The Development of Dutch-Indonesian Primary Schooling : A Study in Colonial Education." Tesis The University of Alberta, Edmonton.
- Sjamsu, M. Amral. 1960. *Dari Kolonisasi ke Transmigrasi 1905-1955*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Soetjiatiningsih, Sri. 1981. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soerabaijasch Handelsblad*. 1933, 13 November.
- Soerabaijasch Handelsblad*. 1935, 19 November
- Soerabaijasch Handelsblad*. 1934, 2 Februari.
- Soerabaijasch Handelsblad*. 1931, 26 Juni.
- Subekti, Arif. 2017 "Ekspansi Kompeni hingga Sanad Kiai-Santri: Sejarah Islamisasi Ujung Timur Pulau Jawa Abad XVII-XX". *Shahih* (2).
- Tim, 2004. *Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004*. Surabaya: Hikmah Press.
- Wasita*. 1929. Juni-Juli.
- Wawancara. Hasnan Singodimayan. Banyuwangi. 19 November 2019.